



# **Raker Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas IV ADPMET**

**Penguatan Hubungan Keuangan  
Pusat dan Daerah  
Dalam Desentralisasi Fiskal**

**3 Juni 2021**



# Outline

1. Upaya Pemulihan Ekonomi

3. Penguatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah



# 1

## UPAYA PEMULIHAN EKONOMI

---

---





# KERANGKA KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI 2021

1

## INTERVENSI KESEHATAN

- **Vaksinasi gratis** → untuk 185,55 juta orang untuk mencapai *herd immunity*
- **Himbauan 3M 3T**
- **Intervensi lainnya** → Fasilitas kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD)

## Program Perlindungan Sosial

Untuk kelompok usia 40-an terbawah dan kelompok rentan: PKH, Kartu Sembako, BST, BLT DD, Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Internet

2

## SURVIVAL AND RECOVERY KIT

## Menjaga Kesiambungan Bisnis

- Dukungan untuk UKM dan Koperasi
- Program prioritas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja

**GAME CHANGER  
2021**

3

## Reformasi Struktural

**Melalui UU Ciptaker** untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pengembangan SWF, Ease of Doing Business, dll.)

**PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**





# AGENDA APBN TA 2021

## Percepatan Pemulihan Ekonomi



### APBN UNTUK PERCEPATAN PEN

Rp.699,42 T

a

KESEHATAN

Rp.176,30 T

b

PERLINDUNGAN SOSIAL

Rp.157,41 T

c

PROGRAM PRIORITAS

Rp.122,42 T

d

DUKUNGAN UMKM &  
KORPORASI

Rp.184,83 T

e

INSENTIF USAHA

Rp.58,46 T

# DAMPAK POSITIF PEMULIHAN EKONOMI DAN PROGRAM PEN ATAS PENYERAPAN TENAGA KERJA

Percepatan penyerapan tenaga kerja dapat mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi

## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Agustus 2020  
**7,07% (TPT)**  
9,77 Jt orang

Februari 2021  
**6,26% (TPT)**  
8,75 Jt orang

Penurunan Feb 21 thd. Agt 20



**0,81 p.p**  
**1.02 jt orang**

**Pemulihan ekonomi telah menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun Sept 20 – Feb 21**

khususnya dari sektor strategis: manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman

- Dengan tren pemulihan ekonomi terkini, khususnya dari sisi produksi, serta dukungan stimulus program PEN, laju penyerapan tenaga kerja akan menguat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan segera membaik
- Program Perlinsos PEN mampu menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.
- Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada Sept-20. Tanpa program PEN, Bank Dunia memprediksi angka kemiskinan Indonesia 2020 dapat mencapai 11,8%, artinya **PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan.**
- Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat efektivitas program perlinsos PEN. Per 18 Mei 2021, program Perlinsos PEN sudah terealisasi Rp.57 T (39% dr pagu) untuk mendukung diantaranya 9,71 jt KPM PKH, 15,93 jt KPM Kartu Sembako, 10 Jt KPM Bansos Tunai, 2,77 juta penerima kartu PraKerja, 3,97 jt KPM BLT Desa, bantuan kuota internet untuk 27,7 jt penerima.
- Upaya pemulihan ekonomi memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah



# 2

## Penguatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah





# PERKEMBANGAN TKDD SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TKDD telah meningkat secara signifikan dari hanya **Rp33.1 T di tahun 2000** menjadi **Rp795.5 T di tahun 2021**.



Mekanisme :

Harapan :

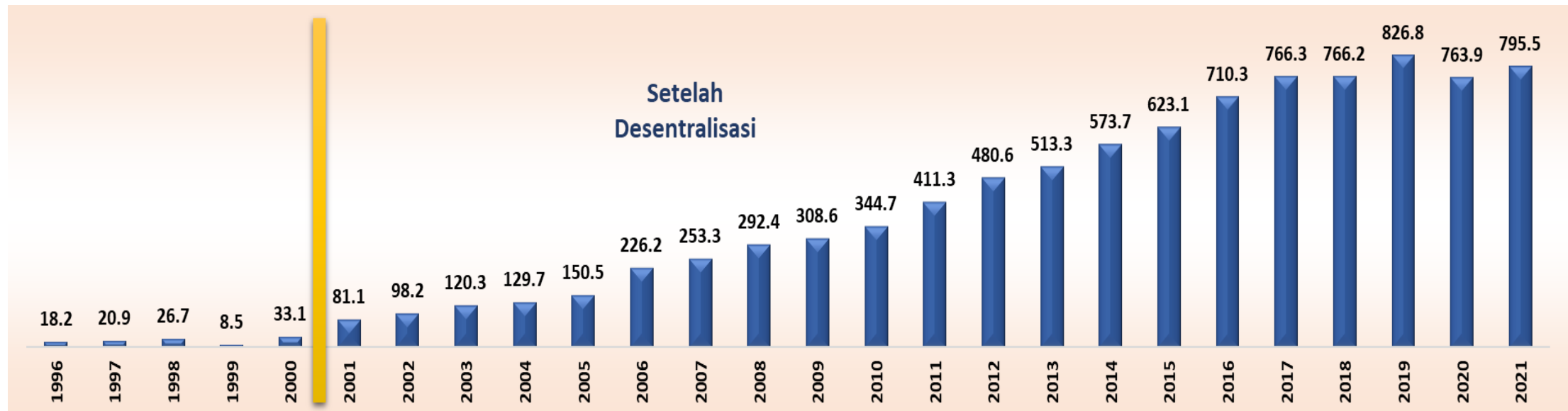
Alokasi Transfer ke Daerah telah **mencapai  $\pm 1/3$  APBN** dalam rangka **mendukung pelaksanaan pembangunan daerah** oleh Entitas yang lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan masyarakatnya



**Mengurangi Kesenjangan Fiskal** antara Pemerintah dan pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintahan Daerah  
(Pasal 3 ayat (2) UU 33/2004)



**Memicu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah**



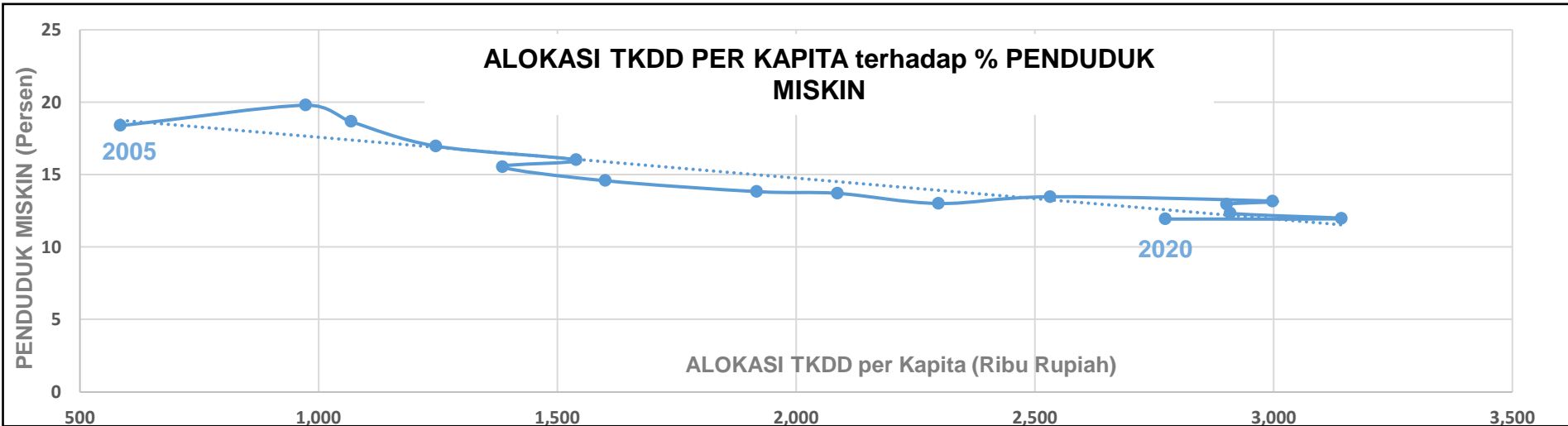




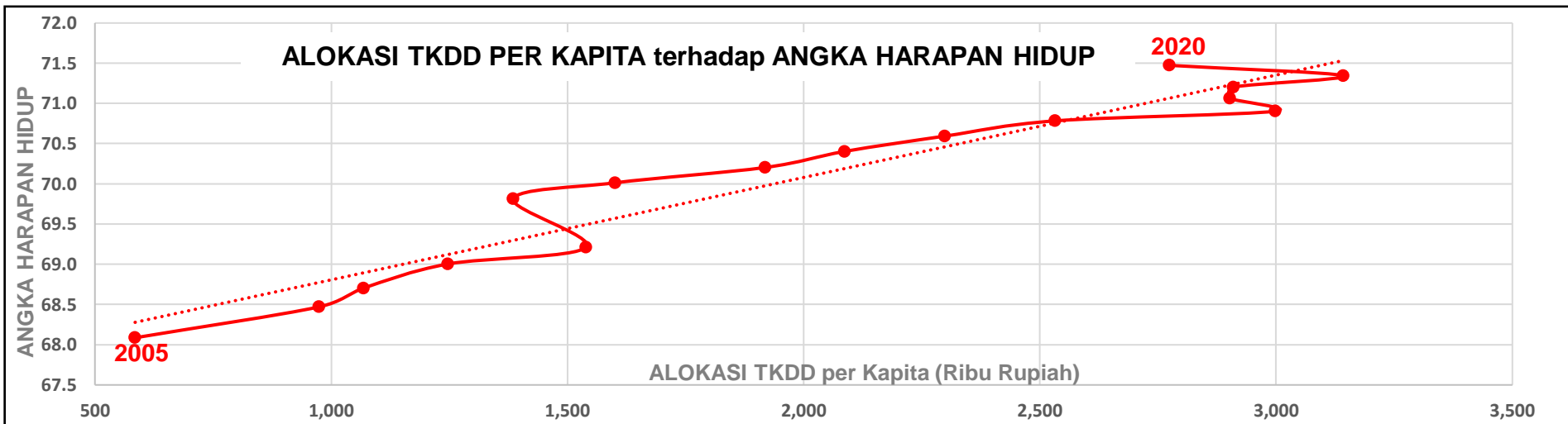
# ALOKASI TKDD PERKAPITA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI 2005 – 2020

(% Penduduk Miskin, Angka Harapan Hidup)

**Alokasi TKDD per kapita berkorelasi positif terhadap penurunan % Penduduk Miskin dan Peningkatan Angka Harapan Hidup**



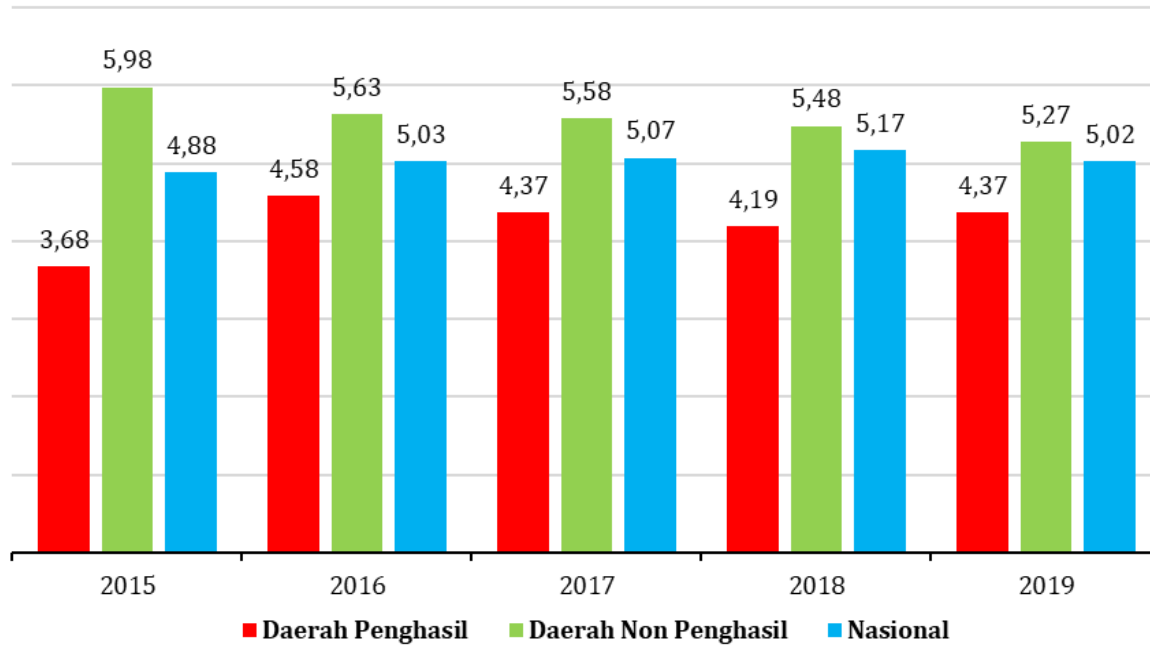
- ❖ Terdapat korelasi positif antara kenaikan alokasi TKDD per kapita tahun 2005 s.d. 2020 dengan perubahan indikator kemiskinan dan angka harapan hidup.
- ❖ Semakin besar alokasi TKDD per kapita, maka terjadi penurunan persentase penduduk miskin, dan kenaikan angka harapan hidup.





# PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PENGHASIL MIGAS DAN DAERAH NON PENGHASIL MIGAS TAHUN 2015-2019

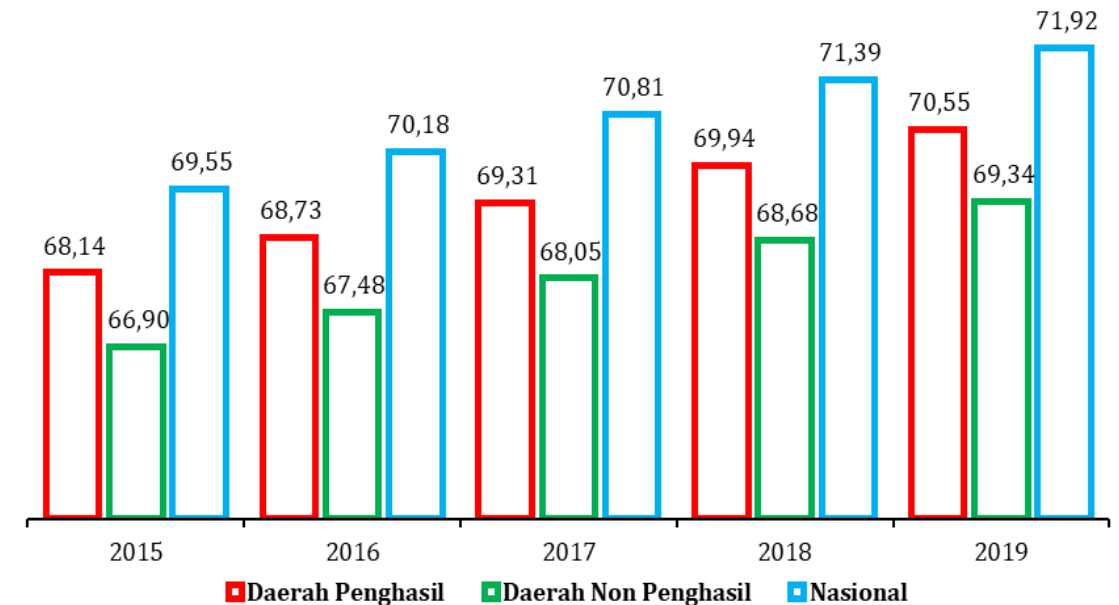
## Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS

- Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata daerah non penghasil migas maupun rata-rata nasional,
- Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah non penghasil migas lebih tinggi dari rata-rata nasional.

## Indeks Pembangunan Manusia



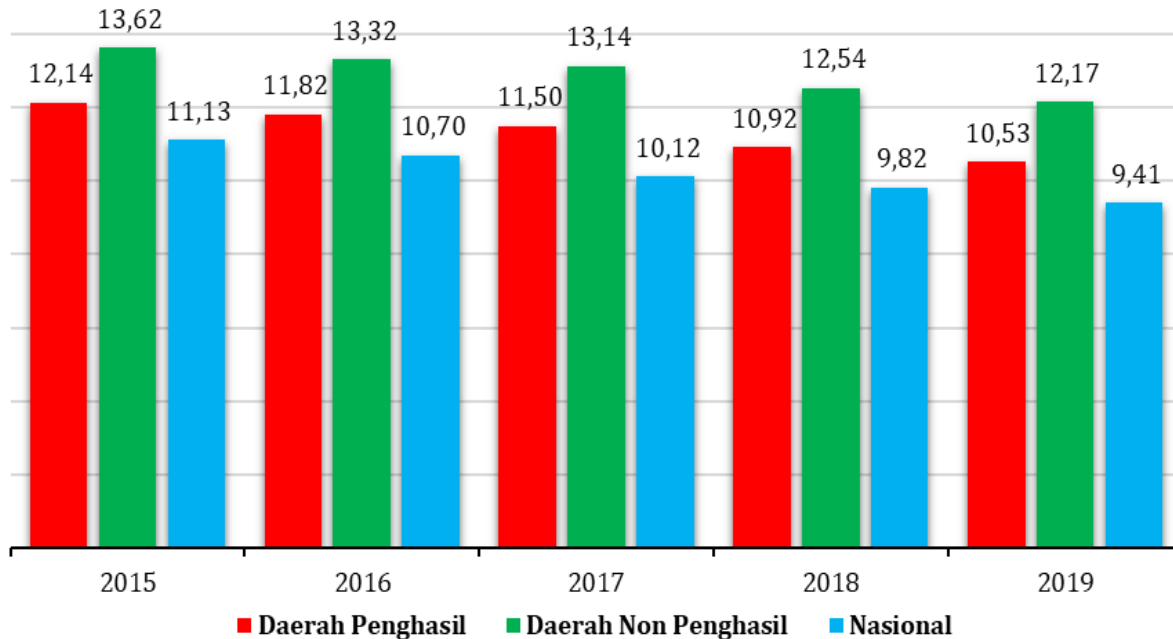
Sumber : BPS

- Persentase rata-rata IPM daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata nasional, tapi lebih tinggi dari rata-rata daerah non penghasil migas.



# KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DAERAH PENGHASIL MIGAS DAN DAERAH NON PENGHASIL MIGAS TAHUN 2015-2019

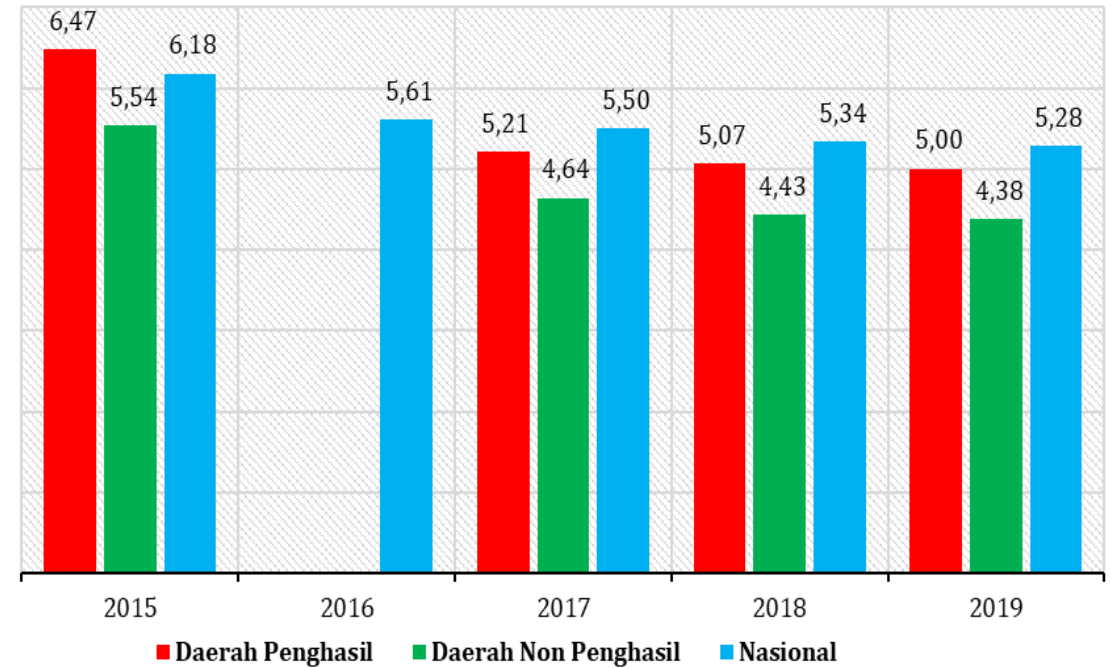
## Persentase Penduduk Miskin



Sumber : BPS (Susesnas Bulan )

- Persentase rata-rata penduduk miskin daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata daerah non penghasil migas.
- Persentase rata-rata penduduk miskin daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata nasional.

## Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber : BPS (Sakernas Bulan Agustus)

Tahun 2016, BPS tidak menyajikan TPT per kab/kota hanya untuk provinsi

- Persentase rata-rata tingkat pengangguran terbuka daerah penghasil migas lebih tinggi dari rata-rata daerah non penghasil migas.
- Persentase rata-rata tingkat pengangguran terbuka daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata nasional, kecuali tahun 2015.



# TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL

## Pengelolaan APBD belum efisien, efektif, dan produktif

- **Banyaknya program** dan kegiatan (program: 26.140, kegiatan: 298.267)
- **Belanja belum efisien** (34% bel. peg; 24% bel. barjas; 18% bel. modal)
- **Standar harga di daerah yang bervariasi dan tinggi** (a.l. biaya rapat dan konsinyering 23-68% > Pusat, uang harian 50% > Pusat, honorarium 16-30% > Pusat)
- Pola **penyerapan** belanja masih **business as usual** (tinggi di Tw IV)
- Dana Pemda **diperbankan masih tinggi** Rp194.54 T (April 2021)
- Pembiayaan kreatif **belum dimanfaatkan** (Rp124 M (APBD 2021))
- Akuntabilitas masih **perlu ditingkatkan** (Smt 1 2020: 6.217 temuan)

## APBD belum berperan optimal dalam mendukung Pusat untuk stabilisasi Fiskal

- Realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi daerah belum optimal (Kesehatan 66,4%, Perlinsos 67,6%, pemulihan ekonomi 53,3%)
- Rendahnya **awareness** daerah untuk menyusun kebijakan **countercyclical**

## Kesenjangan pembangunan



- Korelasi antara input dan **output** masih **lemah**
- Korelasi antara **output** daerah dengan **output dan outcome nasional** lemah
- Kontribusi **Jawa** masih **tinggi** dalam perekonomian (59%)
- Penurunan **stunting** masih **belum tajam**: 30.80% (2018) menjadi 27.67% (2019)
- **Ketimpangan layanan publik**, a.l.:

## Imunisasi Dasar Lengkap



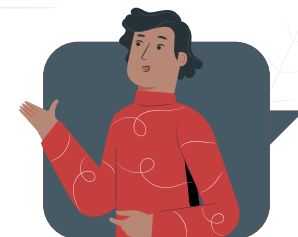
- Nasional 92,96%
- Tertinggi 100% (NTB)
- Terendah 49,64% (Aceh)

## APM SMP



- Nasional 79,40%
- Tertinggi 86,75% (Bali)
- Terendah 57,19% (Papua)

**Produktivitas,  
output PDB, dan  
Daya Saing  
belum optimal  
untuk  
mewujudkan visi  
INDONESIA  
MAJU**



# MASIH TERDAPAT KETIMPANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI ANTAR DAERAH

Tata kelola APBD yang belum efisien dan disiplin belum mendorong upaya percepatan pemerataan pelayanan di seluruh pelosok NKRI

Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah melahirkan **beberapa daerah yang berkinerja baik dan inovatif** dalam penguatan pelayanan publik. Namun, **masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya** agar pemerataan pelayanan masyarakat dapat segera terwujud.

## CAPAIAN OUTPUT



### APM SMP/SMA

#### Capaian Tertinggi

- Kab. Humbang Hasundutan (89,73%)
- Kota Metro (88,39%)
- Kota Bima (88,33%)

#### Capaian Terendah

- Kab. Intan Jaya (13,58%)
- Kab. Sintang (49,28%)
- Kab. Kep. Mentawai (50,34%)

Nasional 69,52%



### AIR MINUM LAYAK

#### Capaian Tertinggi\*

- Kota Magelang (100,00%)
- Kota Tegal (100,00%)
- Kab. Klaten (100,00%)

#### Capaian Terendah

- Kab. Lanny Jaya (1,06%)
- Kab. Mamasa (22,91%)
- Kab. Tulang Bawang Barat (27,4%)

Nasional 89,27%

*\*terdapat 7 Pemda dengan capaian 100%*



### IMUNISASI LENGKAP

#### Capaian Tertinggi

- Kota Salatiga (81,88%)
- Kab. Blitar (80,24%)
- Kota Surakarta (77,59%)

#### Capaian Terendah

- Kab. Puncak (0,53%)
- Kab. Aceh Utara (2,18%)
- Kab. Aceh Tenggara (7,51%)

Nasional 47,21%

*\*(BCG, DPT, Polio, Campak)*

## CAPAIAN OUTCOME



### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

#### Capaian Tertinggi

- Kota Yogyakarta (86,65%)
- Kota Banda Aceh (85,07%)
- Kab. Sleman (83,85%)

#### Capaian Terendah

- Kab. Nduga (30,75%)
- Kab. Sabu Raijua (56,66%)
- Kab. Malaka (60,34%)

Nasional 71,92%



### PENDUDUK MISKIN

#### Capaian Tertinggi

- Kota Tangerang Selatan (1,68%)
- Kab. Badung (1,78%)
- Kota Depok (2,07%)

#### Capaian Terendah

- Kab. Deiyai (43,65%)
- Kab. Sumba Tengah (34,62%)
- Kab. Teluk Bintuni (30,57%)

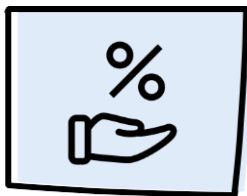
Nasional 11,95%

*Badan Pusat Statistik, Capaian Tahun 2019*





# TANTANGAN PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL



## PENINGKATAN KUALITAS BELANJA

Porsi belanja Belanja Pegawai masih tinggi (32,4% APBD), porsi belanja produktif (al Infrastruktur) dan layanan publik masih relative rendah sehingga multiplier efek kurang optimal



## PENGUATAN TATA KELOLA APBD

- Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD secara administrative membaik namun secara substansi perlu diperkuat;
- Tata kelola APBD yang belum efisien dan disiplin sehingga belum optimal untuk percepatan pemerataan pelayanan



## PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN

Daerah belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternatif untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah



## PENGUATAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH

Sinergi dan harmonisasi gerak langkah APBN dan APBD perlu untuk diperkuat dalam mewujudkan tujuan bernegara



# KONDISI KEUANGAN DAERAH DAN UPAYA PERBAIKAN

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu Menjadi Prioritas

01

## Belanja Daerah masih rendah

Realisasi belanja s.d April 2021 dari sebesar Rp143,89 T (12,7% dari APBD). Pada April 2020 terealisasi 15,9% dari APBD 2020

02

## Simpanan Pemda masih tinggi

Simpanan pemerintah daerah cukup tinggi (Rp 194,54 triliun) dan cenderung mengalami kenaikan sejak awal tahun 2021.

03

## APBD belum optimal

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah, baik yang bersumber dari TKDD maupun sumber pendapatan lainnya, belum digunakan secara optimal.

TKDD sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah **perlu menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan daerah.**

Saat ini Pemerintah tengah menyusun **RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD)** yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.

RUU HKPD bertujuan untuk **mengakselerasi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok NKRI** melalui pengalokasian sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Pokok pengaturan RUU HKPD, antara lain:

- ☐ perpajakan daerah yang mendukung **kemudahan berusaha,**
- ☐ Transfer Ke Daerah yang **berbasis kinerja,**
- ☐ tata kelola belanja daerah secara **efisien dan disiplin,**
- ☐ pembiayaan daerah yang **terkendali,** dan
- ☐ **sinergi kebijakan fiskal** antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan bernegara.



# PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL MELALUI REFORMASI HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (HKPD)



Reformasi HKPD ditujukan untuk **menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien** melalui HKPD yang **transparan, akuntabel**, dan **berkeadilan**, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI



Mengembangkan **sistem pajak daerah** yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien

- Penguatan PDRD melalui sumber perpajakan daerah baru dan opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kab/Kota
- Penghapusan retribusi layanan wajib
- Dukungan kemudahan berusaha



Mengembangkan **HKPD** dalam **meminimumkan ketimpangan** vertikal dan horizontal

- Redesain TKD: mengurangi ketimpangan, memperkuat tata kelola dan kinerja layanan.
- Perluasan skema pembiayaan daerah untuk pembangunan infrastruktur.
- Penerapan skema sinergi pendanaan agar fokus pada penyelesaian program strategis.



Mendorong peningkatan **kualitas belanja daerah** melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD)

- Pengelolaan TKD berbasis kinerja
- TKD digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- Pengendalian disiplin belanja daerah
- Pemantauan dan evaluasi terhadap input, proses, output, dan *outcome*



**Harmonisasi belanja pusat dan daerah** untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga **kesinambungan fiskal**

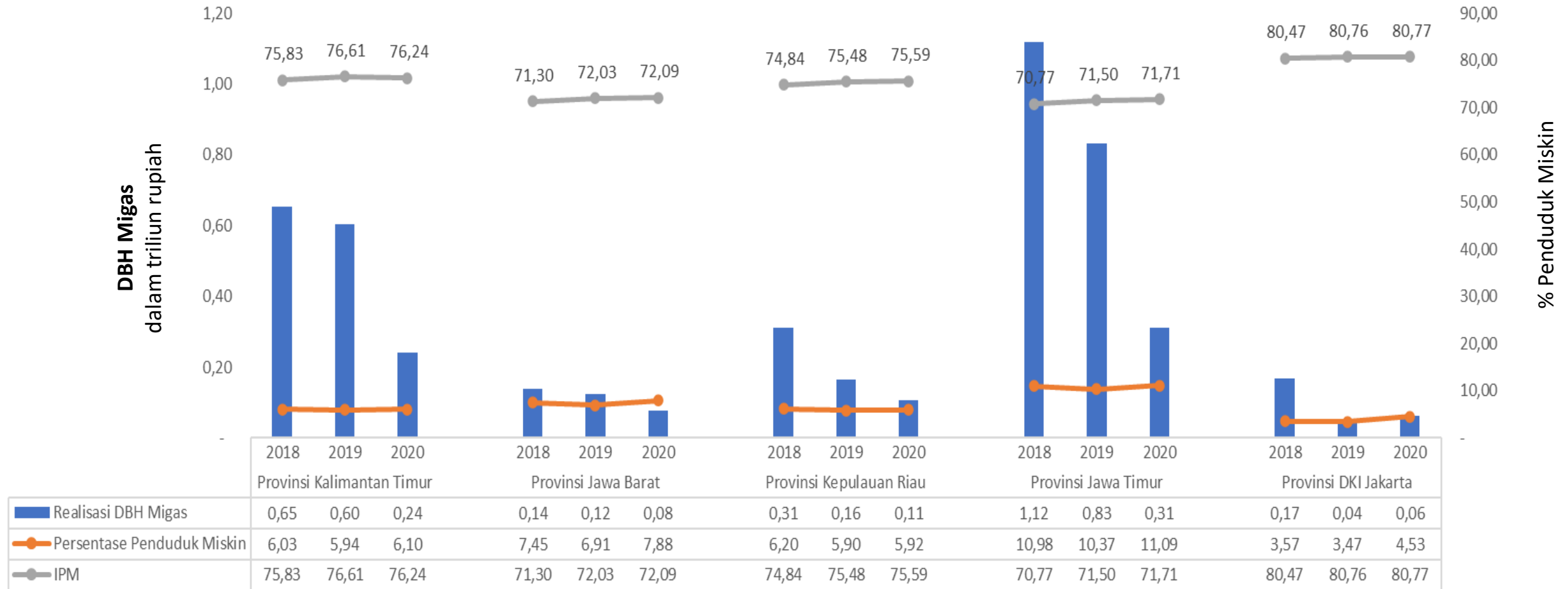
- Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah
- *Sharing responsibility* Pusat dan Daerah melalui desain TKD yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*
- Pengendalian defisit APBD
- *Refocusing* APBD dalam kondisi tertentu
- Penguatan sistem informasi fiskal Pusat dan Daerah



# TERIMA KASIH

# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN IPM

## 5 PROVINSI PENGHASIL DBH MIGAS TERBESAR 2018-2020



- Nilai DBH Migas tidak selalu berbanding lurus dengan capaian IPM dan persentase penduduk miskin.